



RENCANA KERJA TAHUN 2018



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2017

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI BALITBANG

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran
- 2.5 Strategi
- 2.6 Kebijakan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Rencana Program
- 4.2 Rencana Kegiatan

BAB V INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI PENUTUP



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Kasih dan Penyertaannya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara ini dapat diselesaikan.

Dalam Pelaksanaan Pembangunan, setiap SKPD diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah terkait dengan Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan. Ini dimaksudkan untuk menjadi usulan Program dan Kegiatan dalam rangka penyusunan KUA-PPAS sampai kepada penyusunan APBD Kabupaten Minahasa Tenggara, agar supaya pelaksanaan Pembangunan dapat berjalan dengan baik, lancar dan berkesinambungan.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja ini, dengan harapan dapat berguna dalam pencapaian target pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada khususnya dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara pada umumnya.

Ratahan, 2017

KEPALA BALITBANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

Ir. TELLY S. M. POWA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA, IV c
NIP. 19610531 199103 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja perangkat daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan terlaksananya kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan bahan pengolahan data dan informasi serta menganalisa gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya akan sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD yang selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan pada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja perangkat daerah didasarkan atas



pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah;

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran dan total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dengan RKPD yang menjadi acuannya. Renja Perangkat Daerah memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya seperti RPJMD, RTRW dan RPJPD. Sebaliknya Renja Perangkat Daerah dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, RPJMD, Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, KUA, PPAS dan RAPBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2017 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



- Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
31. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2018 adalah untuk melaksanakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan prakiraan maju Tahun 2019 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan kedalam Renja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta menjadi Arah Kebijakan perencanaan pembangunan Badan Litbang untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

1. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan Balitbang;
2. Mendeskripsikan program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Optimalisasi pelaksanaan program-program sesuai dengan yang diharapkan



melalui fokus pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI BALITBANG

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Tujuan
- 2.4 Sasaran
- 2.5 Strategi
- 2.6 Kebijakan

BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 4.1 Rencana Program
- 4.2 Rencana Kegiatan

BAB V INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VI PENUTUP



BAB II PERUMUSAN VISI DAN MISI BALITBANG

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penelitian dan pengembangan daerah dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa kajian penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi rencana pembangunan daerah. Untuk itu disusun Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan program serta kegiatan proiritas dan kegiatan pendukung. Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara harus dikaitkan dengan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertuang dalam RPJMD 2013 -2018.

II.1 Visi dan Misi Balitbang

II.1.1. Visi

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai Badan yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten, maka Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan Tahun 2018 adalah :

“Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif, Kredibel dan Akuntabel”

Tabel II.1
Penyusunan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif, Kredibel dan Akuntabel	Inovatif	Mewujudkan penelitian dan pengembangan yang mampu menjawab permasalahan secara ilmu pengetahuan dan teknologi
	Kredibel	Menghasilkan dokumen/kajian yang dapat dipercaya
	Akuntabel	Menghasilkan dokumen/kajian yang dapat dipertanggungjawabkan

II.1.2. Misi



Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang inovatif, kredibel, dan akuntabel dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.
2. Melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparaturnya Badan Penelitian dan Pengembangan Minahasa Tenggara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya yang dilakukan berdasarkan beberapa indikator yaitu :

- a. Tersedianya sistem perencanaan pembangunan berbasis elektronik (e-planning);
- b. Terkoordinirnya penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan yang berbasis fakta dan data secara tepat waktu;
- d. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi berbasis elektronik (e-monev);
- e. Terbentuknya pusat data dan informasi yang terintegrasi sebagai basic perencanaan pembangunan Minahasa Tenggara dalam bentuk informasi teknologi Web.



Tabel II.2 Perumusan Misi

No.	Visi	Pokok-pokok visi	Stakeholder layanan								Misi
			SKPD lain		Pengguna layanan		Pelaku Ekonomi		Lainnya		
1	Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang Inovatif, Kredibel dan Akuntabel		()	Rincian misi	(x)	-	()	Rincian misi	()	Rincian misi	
		Inovatif									
		Kredibel									
		Akuntabel									



Tabel II.3
Keterkaitan Visi dan Misi Balitbang Kabupaten Minahasa Tenggara dengan
Visi Misi Pemerintah
Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2013-2018.

<p>Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 -2018 :</p> <p>Mitra yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian</p>	<p>Visi BALITBANG Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018 :</p> <p>Menjadi Lembaga Penelitian yang Inovatif, Kredibel dan Akuntabel</p>
<p>Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, demokratis, profesional, melayani, rukun dan damai (Sukses Pemerintahan); 2. Mewujudkan Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang semakin berkualitas, serta memberdayakan masyarakat (Sukses Pemberdayaan Masyarakat); 3. Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian); 4. Mewujudkan infrastruktur publik yang berkualitas, meningkatkan aksesibilitas transportasi, telekomunikasi, energi listrik, air bersih, serta pemerataan pembangunan hingga ke perkampungan dan pesisir (Sukses Pembangunan); 5. Mewujudkan Lingkungan hidup yang asri, lestari, serta aman dari berbagai resiko bencana (sukses lingkungan hidup). 	<p>Misi BALITBANG Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013 – 2018 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang inovatif, kredibel, dan akuntabel dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah. 2. Melakukan pengendalian rencana daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah. 3. Mewujudkan penelitian dan kajian yang berkualitas guna menjawab isu-isu strategis kabupaten.

II.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

II.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan 5 (lima) **tujuan** yang hendak dicapai dalam 2 (dua) tahun terakhir sesuai RPJMD 2013 -2018, sebagai berikut:

1. Terselenggaranya TUPOKSI BALITBANG



2. Tersedianya data dan informasi yang terkini & akurat.
3. Tersedianya dokumen penelitian/kajian yang berkualitas
4. Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengah dan pendek, secara teknokratik, partisipatif, top down/bottom up, dan politis
5. Visualisasi isu strategis, permasalahan, serta arah & potensi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara

Tujuan pertama terkait dengan tugas-tugas umum yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Tujuan kedua sampai kelima adalah sesuai dengan tugas pokok Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara di bidang Sosial, Ekonomi, Pemerintahan, Pembangunan, teknologi dan Inovasi. Dalam hal ini, Balitbang diharapkan mampu terlibat dalam menghasilkan dokumen kajian dan rencana pembangunan daerah yang berkualitas, baik berupa RPJMD, RKPD dan lain-lain.

II.2.2. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Kinerja BALITBANG
2. Data & informasi Kabupaten Minahasa Tenggara yang terkini & akurat serta mudah diakses
3. Arah & kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan potensi yang dimiliki
4. Kajian Penelitian dan Perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertata dan komprehensif

Untuk lebih memudahkan dalam penetapan tujuan, sasaran untuk setiap tahunnya selama lima tahun kedepan maka kami sajikan tabel sebagai berikut:



Tabel.II.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Balitbang Kabupaten
Minahasa Tenggara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terselenggaranya tupoksi BALITBANG	Meningkatnya Kinerja Kinerja BALITBANG	Dokumen Kajian/Penelitian				4 (empat) dokumen	6 (enam) dokumen
2.	Tersedianya data dan informasi yang terkini & akurat.	Data & informasi Kabupaten Minahasa Tenggara yang terkini & akurat serta mudah diakses	Dokumen Data				1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen
3.	Terselenggaranya manajemen perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara baik jangka panjang, menengah dan pendek, secara teknokratik, partisipatif, demokratis, politis dan konsultatif	Arah & kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan potensi yang dimiliki	Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah yang sistematis				1 kegiatan	1 keg
4.	Visualisasi isu strategis, permasalahan, serta arah & potensi pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara	Perencanaan pembangunan Kabupaten Minahasa Tenggara yang tertata dan komprehensif	Dokumen Perencanaan Daerah yang baik				1 (satu) dokumen	1 (satu) dokumen

Faktor-faktor yang mempengaruhi baik pada lingkungan internal maupun eksternal dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Dari hasil analisis SWOT kemudian disusun strategi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan data dan informasi
2. Peningkatan produk perencanaan yang implementatif
3. Peningkatan kesejahteraan aparatur



4. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/SNI/ ISO
5. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan
6. Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya
7. Penerapan sistem reward and punishment yang berkeadilan
8. Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran
9. Perubahan arah perencanaan dari sektoral menjadi kewilayahan
10. Peningkatan partisipatif masyarakat
11. Terjalannya komunikasi dan sinkronisasi dalam mensinergiskan perencanaan pembangunan
12. Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya
13. Peningkatan kualitas data dan informasi
14. Penyediaan dokumen rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan / peruntukannya.
15. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran
16. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran
17. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan
18. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan
19. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan
20. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah
21. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan
22. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah
23. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dari beberapa strategi di atas, kemudian ditetapkan prioritas strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran menggunakan analisis tapisan yang berdasarkan 8 (delapan) indikator, yaitu: (a) waktu pelaksanaan strategi; (b) Besar pengaruhnya dalam mencapai tujuan dan sasaran; (c) Biaya yang diperlukan; (d) Pelaksanaan strategi memerlukan Pengembangan baru, perubahan yang konsekuen, penyesuaian terhadap perundang-undangan, penambahan fasilitas dan penambahan tenaga kerja / staf; (e) Pendekatan terbaik bagi pemecahan masalah; (f) akibat yang ditimbulkan apabila salah dalam melaksanakan strategi; (g) Dampak yang timbul terhadap perangkat daerah lainnya; (h)Sensitivitas strategi terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik.



Berdasarkan hasil analisis tapisan yang telah dilakukan, menghasilkan rumusan 11 (sebelas) strategi utama dari 23 alternatif rencana strategi Balitbang tahun 2013-2018 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan menurut standar mutu/SNI/ISO
2. Peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan pelatihan
3. Peningkatan peralatan kerja dan perlengkapan perkantoran
4. Peningkatan pemenuhan operasional perkantoran
5. Peningkatan kepatuhan para pelaksana kebijakan terhadap regulasi perencanaan pembangunan
6. Menyamakan pemahaman tentang konsistensi perencanaan dan penganggaran didalam perumusan perencanaan pembangunan
7. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan
8. Peningkatan konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah
9. Peningkatan kualitas pengolahan hasil – hasil penelitian dan pengembangan
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas data statistik daerah
11. Peningkatan kualitas data spasial peta analog bagi perencanaan pembangunan

Dengan penjelasan, bahwa sesuai visi dan misi Balitbang Kabupaten Minahasa Tenggara pada lima tahun kedepan, perlunya memanfaatkan teknologi data dan informasi yang digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat dan instansi lainnya yang membutuhkan informasi perencanaan pembangunan daerah yaitu adanya Websiter Balitbang dan tersediannya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) /*e-planning* dan tersediannya koneksi internet dengan kecepatan 10 Mbps.

Perlunya menciptakan produk-produk perencanaan yang implementatif, yang dapat menghasilkan output sesuai indikator kinerja kegiatan, yang menghasilkan capaian program yang direncanakan, yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan berdampak pada pembangunan daerah secara signifikan.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Balitbang, perlu dilakukan pendekatan pelayanan prima yang handal (reliability), tanggap (responsif), dengan keyakinan (confidence), peduli (empati), dan berwujud (tangible).

Untuk mewujudkan itu semua, perlu ditunjang dengan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsinya dan profesionalitas yang mempuni serta penerapan system reward and punishment yang berkeadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 4 Tahun 2016



tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 9 Tahun 2014 tentang RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 96).

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Balitbang menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi SDM Secara Formal dan Non-Formal skala regional, nasional dan Internasional .
2. Meningkatkan penyediaan peralatan Kerja dan perlengkapan perkantoran secara memadai dan mutakhir.
3. Meningkatkan penyediaan operasional perkantoran secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi penyusunan dokumen kajian/penelitian dan perencanaan pembangunan yang partisipatif.
5. Meningkatkan konsistensi perumusan perencanaan dan perumusan penganggaran dalam program/kegiatan pembangunan
6. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.
7. Meningkatkan sinergitas perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang antar instansi dan stake holder (masyarakat).
8. Meningkatkan standar mutu pelayanan.
9. Meningkatkan penerapan hasil – hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data statistik daerah bagi perencanaan pembangunan
11. Meningkatkan pemanfaatan data spasial peta analog terkini bagi perencanaan pembangunan



Visi : Menjadi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Yang Inovatif, Kredibel dan Akuntabel

MISI I : Mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga penelitian dan pengembangan yang Inovatif, kredibel dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur perencana yang Inovatif, kredibel dan Akuntabel.	Meningkatnya disiplin aparatur penelitian dan pengembangan.	Mengefektifkan pemberlakuan <i>reward and punishment</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian reward melalui promosi jabatan, diikutsertakan dalam diklat struktural dan fungsional dll. - Pemberian punishment berupa penundaan hak-hak kepegawaian dan pemotongan TKD.
	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana.	Mengikutsertakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur perencana.	Peningkatan kegiatan kediklatan perencanaan.
		Pengisian jabatan fungsional bidang perencana.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengusulan pejabat fungsional. - Mengikuti diklat jabatan fungsional
	Meningkatnya inovasi dan kreatifitas aparatur perencana.	Mendorong peningkatan kinerja penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengembangan - Meningkatkan frekuensi FGD

MISI II : Melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan koordinasi antar daerah dan antar Perangkat Daerah	Meningkatnya intensitas koordinasi antar daerah dan antar Perangkat Daerah.	Mengoptimalkan koordinasi antar daerah dan antar Perangkat Daerah.	Peningkatan kuantitas koordinasi antar daerah dan antar Perangkat Daerah.



2. Meningkatkan monitoring pelaksanaan program pembangunan.	Meningkatnya monitoring pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.	Mengoptimalkan kegiatan monitoring pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.	Peningkatan kegiatan monitoring pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.
3. Menyelenggarakan evaluasi program pembangunan.	Terselenggaranya evaluasi pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.	Mengoptimalkan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.	Peningkatan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

MISI III : Membuat dokumen perencanaan yang akuntabel.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan akuntabilitas dokumen perencanaan.	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu.	Prosedur penyusunan dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan perundang-undangan	Pengendalian jadwal dan tahapan perencanaan.
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Validitas data dokumen perencanaan.	- Kualitas data yang up to date - Sesuai format dalam dokumen perencanaan
		Sinkronnya antar dokumen perencanaan baik pusat, provinsi.	Mengikuti sosialisasi dan perkembangan peraturan dalam bidang perencanaan.

MISI IV : Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen	Meningkatnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen	Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.



2. Meningkatkan peran pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen penelitian.	Meningkatnya peran pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen penelitian.	Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen penelitian.	Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
---	--	--	---

II.3 Strategi dan Kebijakan

II.3.1 Strategi

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, ditetapkan arah kebijakan dan strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMD 2013 -2018.

Adapun yang menjadi **kebijakan** yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam periode 2013 -2018 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5

Tujuan	Strategi
<p>Misi Kesatu Mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang Inovatif, kredibel, dan akuntabel dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.</p>	Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, yang bersifat lintas dimensi.
<p>Misi Kedua Melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan.</p>	Meningkatkan kualitas kajian pengendalian pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan.
<p>Misi Ketiga Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan</p>	Meningkatkan kualitas evaluasi pembangunan sebagai bahan perencanaan pembangunan

Sedangkan **strategi** yang akan dilaksanakan mencakup strategi eksternal dan internal, yaitu :

1. Eksternal :

- 1) Meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, perencanaan dan penganggaran lintas Perangkat Daerah serta keterkaitan, integrasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;



- 2) Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan investasi.
- 3) Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan investasi.
- 4) Meningkatkan kualitas kajian, hasil penelitian dan pengembangan dan atau evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dan investasi.
- 5) Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan dan investasi.

2. Internal :

- 1) Membangun manajemen kinerja unit kerja hingga kinerja individu/pegawai.
- 2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja unit kerja dan pegawai.
- 3) Meningkatkan kompetensi SDM di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara termasuk perencana dan peneliti secara lebih proporsional dan akuntabel.
- 4) Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara
- 5) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja unit kerja dan pegawai.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

- a. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; penguatan penelitian dan pengembangan, sistem dan kualitas data serta statistik dan informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan.



- b. Penguatan kapasitas penanaman modal melalui penataan sistem koordinasi penyusunan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pengembangan kerjasama, promosi dan peningkatan pelayanan investasi.
- c. Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- d. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan daerah dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan.
- e. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan dan investasi daerah.
- f. Peningkatan kinerja instansi dan pegawai yang berkelanjutan

Tabel II.6

Strategi	Kebijakan
<p>Misi Kesatu</p> <p>Mewujudkan Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai lembaga yang Inovatif, kredibel, dan akuntabel dalam merumuskan perencanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.</p>	<p>Peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses penelitian/kajian maupun perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan daerah</p>
<p>Misi Kedua</p> <p>Melakukan pengendalian rencana dan pelaksanaan pembangunan.</p>	<p>Peningkatan kemampuan teknis dan strategis SDM perencana</p> <p>Membangun dan mengembangkan sarana prasarana institusi perencanaan</p>
<p>Misi Ketiga</p> <p>Melakukan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan</p>	<p>Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin</p>

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penelitian dan pengembangan daerah, periode tahun 2013 -2018 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara menetapkan program sesuai RPJMD periode 2013 -2018 yaitu program prioritas dan program pendukung.



Program prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Badan Penelitian dan Pengembangan dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian/penelitian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Sedangkan program pendukung dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Program ini tidak dapat mencerminkan pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), peran dan kewenangan Balitbang sebagai instansi penelitian dan pengembangan.

Program-program yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Balitbang Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan RPJMD 2013 -2018 sebagai berikut :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Balitbang dalam proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari :

- Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
- Program Perencanaan Pembangunan, Inovasi, dan Teknologi
- Program Penelitian dan Pengembangan
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA
- Program Pengembangan Penelitian Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Pengembangan Data/informasi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- Program perencanaan Tata Ruang
- Program Pemanfaatan Ruang
- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

2. Program Pendukung, yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Program Peningkatan disiplin Aparatur
- Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan-kegiatan prioritas :

- 1). Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang
- 2). Penetapan Kebijakan tentang RDTR, dan RTBL



- 3). Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang
- 4). Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 5). Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- 6). Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
- 7). Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
- 8). Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 9). Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 10). Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 11). Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
- 12). Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 13). Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana
- 15). Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/ Air minum
- 16). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 22). Pembangunan Kawasan Agropolitan dan Minapolitan
- 25). Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
- 26). Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur
- 28). Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
- 35). Penyusunan Profile Daerah
- 36). Fasilitasi Kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga
- 37). Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 38). Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 39). Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
- 40). Penyusunan Rancangan RPJPD
- 41). Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
- 42). Penetapan RPJPD
- 43). Penyusunan Rancangan RPJMD
- 44). Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
- 45). Review RPJMD
- 47). Penetapan RPJMD
- 48). Penyusunan Rancangan RKPD
- 49). Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 50). Penetapan RKPD



- 51). Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 52). Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati
- 53). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 54). Penyusunan Minahasa Tenggara Dalam Angka
- 55). Penyusunan PDRB
- 56). Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
- 57). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 60). Koordinasi Bidang Sosial Ekonomi dan Pemerintahan
- 61). Koordinasi Bidang Pembangunan Teknologi dan Inovasi
- 62). Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

b. Kegiatan-kegiatan Pendukung :

- 1). Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- 3). Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- 4). Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5). Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6). Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7). Penyediaan Alat Tulis kantor
- 8). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9). Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10). Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11). Penyediaan makanan minuman
- 12). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 13). Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 14). Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- 16). Pengadaan Meubelair
- 17). Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 18). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 19). Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan perlengkapannya
- 20). Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan



BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Secara garis besar sesuai tugas dan fungsi Balitbang, kinerja pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan belum kelihatan karena baru terbentuk pada akhir tahun 2016 dan baru memulainya di awal tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Tipe C Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
				Rp	%
BELANJA					
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	GAJI				
	TKD				
II	BELANJA LANGSUNG				
A	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				
	1				
B	PROGRAM				
	1				
C	PROGRAM				
	1				
		TOTAL		Rp.	



BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1. Rencana Program

Sesuai dengan RPJMD 2013 -2018, rencana program Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

1. Program Prioritas, dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Balitbang dalam proses penelitian, perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan perencanaan pembangunan, yang terdiri dari :
 - Program Perencanaan Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan
 - Program Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
 - Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Program Perencanaan SDA, Sarana dan Prasarana
 - Program Perencanaan Litbang
2. Program Pendukung, yaitu :
 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
 - Program Peningkatan disiplin Aparatur
 - Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.2. Rencana Kegiatan

Rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah :

a. Kegiatan-kegiatan prioritas :

- 1) Penyusunan Rancangan RPJPD
- 2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
- 3) Penetapan RPJPD
- 4) Penyusunan Rancangan RPJMD
- 5) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
- 6) Penetapan RPJMD
- 7) Penyusunan Rancangan RKPD
- 8) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- 9) Penetapan RPKPD
- 10) Evaluasi RKPD dan RPJMD



- 11) Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan
- 12) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- 13) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Rencana Tata Ruang
- 14) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
- 15) Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
- 16) Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
- 17) Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 18) Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 19) Fasilitasi Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 20) Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 21) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- 22) Penyusunan Profile Daerah
- 23) Penyusunan PDRB Minahasa Tenggara
- 24) Penyusunan Minahasa Tenggara Dalam Angka
- 25) Penyusunan Indikator Ekonomi Makro Daerah
- 26) Penyusunan Incremental Capital Output Ratio
- 27) Penyusunan Koefisien Gini Daerah
- 28) Penyusunan Indeks Wiliamson
- 29) Penyusunan Masterplan Komoditi Perkebunan Kelapa
- 30) Penyusunan Masterplan Pengembangan Pariwisata
- 31) Penyusunan Masteplan Pertanian
- 32) Penyusunan Masterplan Investasi Daerah
- 33) Penyusunan Masterplan Kemaritiman Daerah
- 34) Penyusunan Masterplan Perindustrian
- 35) Penyusunan Masterplan Kawasan Budidaya
- 36) Penyusunan Masterplan Pertambangan
- 37) Koordinasi Perekonomian Daerah
- 38) Monitoring dan Evaluasi Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- 39) Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Kawasan Rawan Bencana
- 40) Pembangunan Kawasan Minapolitan
- 41) Fasilitasi Kerja sama dengan dunia usaha/ lembaga pendidikan
- 42) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik



- 43) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- 44) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
- 45) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan
- 46) Koordinasi Penyusunan Masterplan Kesehatan
- 47) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- 48) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
- 49) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- 50) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati

b. Kegiatan-kegiatan Pendukung :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 7) Penyediaan Alat Tulis kantor
- 8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 9) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 10) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan makanan minuman

Rencana program dan kegiatan dan pendanaan yang diusulkan untuk periode 2018 diuraikan dalam table berikut :



NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	BELANJA LANGSUNG					
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				386.860.000	
	1 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah administrasi umum		1 thn	73.150.000	APBD Mitra
		Honorarium Pegawai Honoror	3 Orang Pegawai Honoror	Balitbang	1 thn	APBD Mitra
	2 Belanja Barang dan Jasa					
		Belanja ATK		1 thn	8.000.000	APBD Mitra
		Belanja Alat Listrik dan Elektronik (TV, Genset, AC, Wifi, LCD, Sound System,		1 thn	110.000.000	APBD Mitra
		Belanja Perangko Materai dan Beda Pos Lainnya		1 thn	5.000.000	APBD Mitra
		Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		1 thn	4.000.000	APBD Mitra
		Belanja Listrik		1 thn	15.000.000	APBD Mitra
				1 thn		APBD Mitra



		Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan		1 thn	28.710.000	APBD Mitra
	3	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan administrasi barang dan jasa		1 thn	25.000.000	APBD Mitra
	4	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian		1 thn	5.000.000	APBD Mitra
	5	Penataan Kearsipan	Jumlah kearsipan		1 thn	5.000.000	APBD Mitra
	6	Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi		1 thn	250.000.000	APBD Mitra
B		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				1.075.000.000	
	1	Pengadaan kendaraan Dinas roda empat	Jumlah kendaraan dinas		1 unit	300.000.000	APBD Mitra
		Pengadaan Handycam	Jumlah Handycam		1 Unit	15.000.000	APBD Mitra
		Pengadaan Jaringan Wifi	Jumlah		1 Unit	75.000.000	APBD Mitra
	2	Pengadaan kendaraan Dinas roda dua	jumlah kendaraan dinas		2 unit	50.000.000	APBD Mitra
	3	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor		1 paket	75.000.000	APBD Mitra
	4	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		1 paket	60.000.000	APBD Mitra



	5	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur		1 Paket	150.000.000	APBD Mitra
	6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor		1 unit	75.000.000	APBD Mitra
	7	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas oprasional	Jumlah kendaraan dinas		2 mobil 3 mtr	65.000.000	APBD Mitra
	8	Pembuatan sekat kantor	Jumlah sekat kantor		1 paket	300.000.000	APBD Mitra
Kebutuhan Dana (Rp)							
NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Kebutuhan Dana (Rp)			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
C	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					60.000.000	
	1	Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga		20 org	20.000.000	APBD Mitra
	2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus		20 org	20.000.000	APBD Mitra
	3	Pengadaan pakaian dinas PNS beserta perengkapannya	Jumlah pakaian dinas		20 org	20.000.000	APBD Mitra
D	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur					100.000.000	
	1	Bimtek, Diklat, Kursus dan Pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek, Diklat, Kursus dan Pelatihan		14 org	100.000.000	APBD Mitra
E	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					40.000.000	
	1	Pembuatan LAKIP	Tersedianya Lakip		1 dok	5.000.000	APBD Mitra
	2	Pembuatan RKA PD	Tersedianya RKA		1 dok	5.000.000	APBD Mitra



	3	Pembuatan Laporan Tahunan	Tersedianya laporan tahunan		1 dok	2.000.000	APBD Mitra
	4	Pembuatan LLPD	Tersedianya laporan LLPD		1 dok	5.000.000	APBD Mitra
	5	Pembuaan Renja	Tersedianya Renja		1 dok	5.000.000	APBD Mitra
	6	Pembuaan Renstra	Tersedianya Renstra		1 dok	5.000.000	APBD Mitra
	7	Forum SKPD/PD	Terlaksananya Forum SKPD/PD		1 Keg	10.000.000	APBD Mitra
	8	Penyusunan SOP	Tersedianya SOP		1 dok	3.000.000	APBD Mitra
F							
	Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama					105.000.000	
	1	Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil	Jumlah Dokumen		1 dok	5.000.000	APBD Mitra
	2	Simpul-simpul jaringan daerah	Jumlah Kegiatan		1 keg	100.000.000	APBD Mitra
G							
	Program Penelitian dan Pengembangan					3.100.000.000	APBD Mitra
	1	Monitoring Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan dan kecamatan	Jumlah kunjungan		1 keg	10.000.000	APBD Mitra
	2	Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi hasil laut di wilayah pesisir Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD Mitra
	3	Kajian potensi objek wisata dalam mendongkrak perekonomian masyarakat Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	150.000.000	APBD Mitra
	4	Analisis situs-situs budaya dalam memajukan industri pariwisata di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD Mitra
	5	Rencana induk kawasan pariwisata pantai lakban	Jumlah dokumen		1 dok	150.000.000	APBD Mitra



	6	Rencana induk kawasan pariwisata pantai lumintang	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	7	Rencana induk kawasan pariwisata pantai mangkit	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	8	Rencana induk kawasan pariwisata pulau baling-baling dan pulau punten	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	9	Kajian upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	300.000.000	APBD Mitra
	10	Evalasi kebijakan pemerintah tentang keberhasilan PKH dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	300.000.000	APBD Mitra
	11	Potensi dan masalah pengembangan agrobisnis dan agroindustry (komoditi unggulan Jagung, Cengkeh, Kelapa)	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD Mitra
	12	Implikasi kemauan membayar tarif retribusi kebersihan terhadap pengembangan system pengelolaan sampah di kawasan permukiman Kecamatan Ratahan	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	13	Kajian partisipasi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan ketaatan lingkungan hidup	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	14	Ketimpangan pendapatan rumah tangga kaitannya terhadap pengembangan wilayah (studi kasus : daerah patai, dataran dan dataran tinggi pegunungan)	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD Mitra
	15	Kajian kemacetan lalu lintas pada kawasan pusat perkotaan Ratahan	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra



	16	Pedestrian kawasan pusat kota studi kasus kawasan pusat kota	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD Mitra
	17	Minat dan motivasi siswa memilih SMK mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD Mitra
	18	Dampak kehadiran institusi pendidikan terhadap migrasi dan perkembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen		1 dok	150.000.000	APBD Mitra
	19	Penelitian Manfaat Biji Salak pada tubuh manusia dalam produk olahan Kopi Biji Salak (KOBISA)	Jumlah dokumen		1 dok	250.000.000	APBD/APBN
	20	Penelitian Manfaat CCTV terhadap perilaku masyarakat Kota Ratahan dalam program Kota Sehat Adipura	Jumlah dokumen		1 dok	250.000.000	APBD/APBN
	21	Penelitian peran Lembaga Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	400.000.000	APBD/APBN
	22	Penelitian manfaat pengembangan Hutan Mangrove bagi masyarakat pesisir (Kec. Pusomaen, Belang, Ratatotok)	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD/APBN
	23	Penelitian peran E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting dalam Sistem Informasi Daerah (Simda) dan Opini BPK di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	100.000.000	APBD/APBN
	24	Penelitian Pola Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	300.000.000	APBD/APBN
	25	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Cengeh dan Turunannya	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD/APBN
	26	Potensi pengembangan agrobisnis dan agroindustri (komoditi unggulan Jagung, Cengkeh, Kelapa) di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200.000.000	APBD/APBN
					Jumlah	7.356.860.000	





BAB V

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Balitbang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Balitbang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



Tabel 5.1
Indikator Kinerja Balitbang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Kabupaten Minahasa Tenggara

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Kinerja Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Penataan Ruang							
	Rasio RTH per satuan luas wilayah				30%	30%	30%	
	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan				20%	25%	25%	
	Prosentase ruang public yang berubah peruntukannya				10%	5%	5%	
	Prosentase kawasan yang memiliki Rencana Rinci Tata Ruang (RDTR)				10%	20%	20%	
	Prosentase cakupan pelayanan pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai peraturan daerah tentang RTR Wilayah beserta Rencana Rincinya				60%	80%	80%	
	Ketersediaan RTH public seluas 20% terhadap luas wilayah Kabupaten				80%	90%	90%	
	Prosentase ketersediaan rumah layak huni				20%	9%	9%	
	Prosentase ketersediaan rumah layak huni terjangkau				20%	5%	5%	
	Ketersediaan Master Plan Drainase						1 dok	1 dok
	Ketersediaan Master Plan Jalan dan Jembatan						1 dok	1 dok
	Ketersediaan Master Plan Jaringan Irigasi						1 dok	1 dok
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Agropolitan						1 dok	1 dok
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Minapolitan						1 dok	1 dok
	Ketersediaan Master Plan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh						1 dok	1 dok
	Ketaatan terhadap RTRW						100%	100%
	Luas wilayah produktif						40%	40%
	Luas wilayah industri						10%	10%
	Luas wilayah banjir						0%	0%
Luas wilayah kekeringan						10%	10%	
Luas wilayah perkotaan						15%	20%	
2.	Perencanaan Pembangunan							
	Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah						1 dok	1 dok
	Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah						1 dok	
	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah						1 dok	1 dok
	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD						1 dok	1 dok
3.	Statistik							
	Buku "Profil Kab. Minahasa Tenggara"						1 dok	1 dok





BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 adalah panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Balitbang untuk 1 (satu) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renja 2018 sangat ditentukan oleh kesiapan Perangkat Daerah, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf Balitbang Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja 2018, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat evaluasi Renja Badan Penelitian dan Pengembangan 2018 adalah target dan indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dari tema pembangunan yang mengacu pada RKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018.

Renja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 harus benar-benar menjadi acuan kerja bagi bidang-bidang dan sub bidang secara khusus dan Badan Penelitian dan Pengembangan pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua dapat melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, kredibel dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) Balitbang dan kinerja pegawainya.

Kepala BALITBANG
Kabupaten Minahasa Tenggara

Ir. TELLY S. M. POWA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 199103 1 001



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								8	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BELANJA LANGSUNG								
	A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				468,860,000.00				521,600,000.00
	I. Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Jumlah administrasi umum	Balitbang	1 thn	73,150,000.00			1 thn	81,600,000.00
	Honorarium Pegawai Honoror	3 Orang Pegawai Honoror	Balitbang	1 thn	73,150,000.00	APBD Mitra		1 thn	81,600,000.00
	II. Belanja Barang dan Jasa				395,710,000.00				440,000,000.00
	1 Belanja ATK	Tersedianya ATK	Balitbang	1 thn	8,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	10,000,000.00
	2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	Balitbang	1 thn	10,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	12,000,000.00
	3 Belanja Perangko Materai dan Beda Pos Lainnya	Tersedianya Perangko Materai dan Beda Pos Lainnya	Balitbang	1 thn	5,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	7,000,000.00
	4 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	Balitbang	1 thn	4,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	6,000,000.00
	5 Belanja Listrik	Tersedianya Listrik	Balitbang	1 thn	15,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	18,500,000.00
	6 Belanja Sumbungan Internet	Tersedianya Sumbungan Internet	Balitbang	1 thn	40,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	40,000,000.00
	7 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah kebutuhan administrasi keuangan	Balitbang	1 thn	28,710,000.00	APBD Mitra		1 thn	30,000,000.00
	8 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang dan Jasa	Jumlah kebutuhan administrasi barang dan jasa	Balitbang	1 thn	25,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	27,000,000.00
	9 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Jumlah kebutuhan administrasi kepegawaian	Balitbang	1 thn	5,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	7,000,000.00
	10 Penataan Kearsipan	Jumlah dokumen yang diarsipkan	Balitbang	1 thn	5,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	6,500,000.00
	11 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Balitbang	1 thn	250,000,000.00	APBD Mitra		1 thn	276,000,000.00
	B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana				1,570,950,000.00				1,577,950,000.00
	1 Pengadaan kendaraan Dinas roda empat	Tersedianya kendaraan dinas roda empat	Balitbang	1 unit	300,000,000.00	APBD Mitra		1 unit	300,000,000.00
	2 Pengadaan Handycam	Tersedianya Handycam	Balitbang	1 Unit	15,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	16,000,000.00
	3 Pengadaan Jaringan Wifi	Tersedianya jaringan wifi	Balitbang	1 Unit	75,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	78,000,000.00
	4 Pengadaan kendaraan Dinas roda dua	Tersedianya kendaraan dinas	Balitbang	2 unit roda dua	50,000,000.00	APBD Mitra		2 unit roda dua	53,000,000.00
	5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Balitbang	1 paket	75,000,000.00	APBD Mitra		1 paket	75,000,000.00
	6 AC 3/4 PK	Tersedianya AC 3/4 PK	Balitbang	2 Unit	12,000,000.00	APBD Mitra		2 Unit	12,000,000.00
	7 AC Standing	Tersedianya AC Standing	Balitbang	1 Unit	25,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	25,000,000.00
	8 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Balitbang	1 paket	60,000,000.00	APBD Mitra		1 paket	60,000,000.00
	9 sound system	Tersedianya sound system	Balitbang	1 Paket	20,000,000.00	APBD Mitra		1 Paket	20,000,000.00
	10 TV	Tersedianya TV	Balitbang	2 Unit	20,000,000.00	APBD Mitra		2 Unit	20,000,000.00
	11 Kamera Digital	Tersedianya Kamera digital	Balitbang	1 Unit	9,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	9,000,000.00
	12 Dispenser	Tersedianya dispenser	Balitbang	1 Unit	3,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	3,000,000.00
	13 Laptop	Tersedianya Laptop	Balitbang	6 Unit	48,000,000.00	APBD Mitra		6 Unit	48,000,000.00
	14 LCD Projector	Tersedianya LCD Projector	Balitbang	1 Paket	18,600,000.00	APBD Mitra		1 Paket	18,600,000.00
	15 Drone	Tersedianya Drone	Balitbang	1 Unit	40,000,000.00	APBD Mitra		1 Unit	40,000,000.00
	16 Handy Talky	Tersedianya Handy Talky	Balitbang	2 Unit	13,000,000.00	APBD Mitra		2 Unit	13,000,000.00
	17 Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Balitbang	1 Paket	150,000,000.00	APBD Mitra		1 Paket	150,000,000.00
	18 Meja Kerja Es.III	Tersedianya meja kerja Es. III	Balitbang	3 buah	25,200,000.00	APBD Mitra		3 buah	25,200,000.00
	19 Meja Kerja Es. IV	Tersedianya Meja Kerja Es. IV	Balitbang	8 buah	61,600,000.00	APBD Mitra		8 buah	61,600,000.00
	20 Kursi Kerja	Tersedianya Kursi Kerja	Balitbang	7 buah	37,800,000.00	APBD Mitra		7 buah	37,800,000.00
	21 Lemari	Tersedianya Lemari	Balitbang	2 buah	4,000,000.00	APBD Mitra		2 buah	4,000,000.00

		22	Meja Komputer	Tersedianya Meja Komputer	Balitbang	3 buah	3,750,000.00	APBD Mitra		3 buah	3,750,000.00
		23	Filling kabinet	Tersedianya Filling kabinet	Balitbang	4 buah	20,000,000.00	APBD Mitra		4 buah	20,000,000.00
		24	Kursi Rapat	Tersedianya Kursi Rapat	Balitbang	1 paket	45,000,000.00	APBD Mitra		1 paket	45,000,000.00
		25	Rehabilitasi berkala gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi berkala gedung kantor	Balitbang	1 unit	75,000,000.00	APBD Mitra		1 unit	75,000,000.00
		26	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas oprasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Balitbang	2 mobil 3 mtr	65,000,000.00	APBD Mitra		2 mobil 3 mtr	65,000,000.00
		27	Pembuatan sekat kantor	Jumlah sekat kantor	Balitbang	1 paket	300,000,000.00	APBD Mitra		1 paket	300,000,000.00
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur							60,000,000.00				75,000,000.00
		1	Pengadaan Pakaian Seragam Olah Raga	Tersedianya Pakaian Seragam Olah		20 org	20,000,000.00	APBD Mitra		25 org	25,000,000.00
		2	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian khusus hari-hari tertentu		20 org	20,000,000.00	APBD Mitra		25 org	25,000,000.00
		3	Pengadaan pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas PNS beserta perlengkapannya		20 org	20,000,000.00	APBD Mitra		25 org	25,000,000.00
D Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur							100,000,000.00				115,000,000.00
		1	Bimtek, Diklat, Kursus dan Pelatihan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek, Diklat, Kursus dan Pelatihan		14 org	100,000,000.00	APBD Mitra		14 org	115,000,000.00
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							40,000,000.00				57,000,000.00
		1	Pembuatan LAKIP	Tersedianya Lakip		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		2	Pembuatan RKA PD	Tersedianya RKA		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		3	Pembuatan Laporan Tahunan	Tersedianya laporan tahunan		1 dok	2,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	5,000,000.00
		4	Pembuatan LLPD	Tersedianya laporan LLPD		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		5	Pembuaan Renja	Tersedianya Renja		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		6	Pembuaan Renstra	Tersedianya Renstra		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		7	Forum SKPD/PD	Terlaksananya Forum SKPD/PD		1 Keg	10,000,000.00	APBD Mitra		1 Keg	10,000,000.00
		8	Penyusunan SOP	Tersedianya SOP		1 dok	3,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
F Program Kelembagaan/Koordinasi dan Kerjasama							105,000,000.00				107,000,000.00
		1	Evaluasi dan Pelaporan Hasil-hasil	Jumlah Dokumen		1 dok	5,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	7,000,000.00
		2	Simpul-simpul jaringan daerah	Jumlah Kegiatan		1 keg	100,000,000.00	APBD Mitra		1 keg	100,000,000.00
G Program Penelitian dan Pengembangan							4,460,000,000.00				5,312,000,000.00
		1	Monitoring Kegiatan Musrenbang Desa/Kelurahan, kecamatan dan Kabupaten	Jumlah kunjungan		1 keg	10,000,000.00	APBD Mitra		1 keg	12,000,000.00
		2	Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produksi hasil laut di wilayah pesisir Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
		3	Kajian potensi objek wisata dalam mendorong perekonomian masyarakat Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	150,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
		4	Analisis situs-situs budaya dalam memajukan industri pariwisata di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
		5	Rencana induk kawasan pariwisata pantai lakban	Jumlah dokumen		1 dok	150,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
		6	Rencana induk kawasan pariwisata pantai lumintang	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00

			7	Rencana induk kawasan pariwisata pantai mangkit	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			8	Rencana induk kawasan pariwisata pulau baling-baling dan pulau punten	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			9	Kajian upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			10	Evalasi kebijakan pemerintah tentang keberhasilan PKH dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			11	Potensi dan masalah pengembangan agrobisnis dan agroindustry (komoditi unggulan Jagung, Cengkeh, Kelapa)	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			12	Implikasi kemauan membayar tarif retribusi kebersihan terhadap pengembangan system pengelolaan sampah di kawasan permukiman Kecamatan Ratahan	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			13	Kajian partisipasi pelaku usaha dalam pengurusan perizinan dan ketaatan lingkungan hidup	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			14	Ketimpangan pendapatan rumah tangga kaitannya terhadap pengembangan wilayah (studi kasus : daerah patai, dataran dan dataran tinggi pegunungan)	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			15	Kajian kemacetan lalulintas pada kawasan pusat perkotaan Ratahan	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			16	Pedestrian kawasan pusat kota studi kasus kawasan pusat kota	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			17	Minat dan motivasi siswa memilih SMK mendorong peningkatan mutu pendidikan di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			18	Dampak kehadiran institusi pendidikan terhadap migrasi dan perkembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen		1 dok	150,000,000.00	APBD Mitra		1 dok	200,000,000.00
			19	Penelitian Manfaat Biji Salak pada tubuh manusia dalam produk olahan Kopi Biji Salak (KOBISA)	Jumlah dokumen		1 dok	250,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	250,000,000.00
			20	Penelitian Manfaat CCTV terhadap prilaku masyarakat Kota Ratahan dalam program Kota Sehat Adipura	Jumlah dokumen		1 dok	250,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	250,000,000.00
			21	Penelitian peran Lembaga Desa terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	400,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	400,000,000.00
			22	Penelitian manfaat pengembangan Hutan Mangrove bagi masyarakat pesisir (Kec. Pusomaen, Belang, Ratatotok)	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	200,000,000.00
			23	Penelitian peran E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting dalam Sistem Informasi Daerah (Simda) dan Opini BPK di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	100,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	100,000,000.00

		24	Penelitian Pola Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	300,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	300,000,000.00	
		25	Penelitian dan Pengembangan Tanaman Cengeh dan Turunannya	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	200,000,000.00	
		26	Potensi pengembangan agrobisnis dan agroindustri (komoditi unggulan Jagung, Cengeh, Kelapa) di Kab. Minahasa Tenggara	Jumlah dokumen		1 dok	200,000,000.00	APBD/APBN		1 dok	200,000,000.00	
							Jumlah	7,200,520,000.00				8,205,550,000.00

Kepala BALITBANG
Kabupaten Minahasa Tenggara

Ir. TELLY S. M. POWA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610531 199103 1 001